



## KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

Nomor : B-386.b/01000/ES/11/2023

Jakarta, 6 November 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) set

Hal : Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)

Yth. Bupati Aceh Singkil

di -

Tempat

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengatur bahwa kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral, Badan Pusat Statistik sebagai pembina data statistik telah melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2023 di Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dengan berpedoman pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Berdasarkan hasil EPSS, nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 adalah **1,36** dengan predikat "**Kurang**". Rincian hasil evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral disampaikan pada Lampiran.

Demikian disampaikan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2023. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam penyelenggaraan statistik sektoral dan penguatan Sistem Statistik Nasional. Selanjutnya kami berharap agar upaya-upaya ini dapat ditingkatkan secara berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih.

Plt. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

**Amalia Adininggar Widyasanti**

Tembusan:

1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Menteri Dalam Negeri

Jl. Dr. Sutomo 6-8 Jakarta 10710, Kotak Pos 1003, Jakarta 10010, Telp: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4,  
Fax (021) 3857046, Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: [bps@bps.go.id](mailto:bps@bps.go.id)



Lampiran Surat Kepala Badan Pusat Statistik

Nomor : B-386.b/01000/ES/11/2023

Tanggal : 6 November 2023

# Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial 2023

PEMERINTAH KABUPATEN  
ACEH SINGKIL



**BADAN PUSAT STATISTIK**



\* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

\* Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli

# 1 EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

## DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.
- c. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024.
- e. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

## PENJELASAN UMUM

Statistik memiliki arti penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional. Kegiatan statistik dituntut untuk menghasilkan statistik yang berkualitas, cepat, dan beragam sesuai kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik pada instansi pemerintah.

EPSS adalah suatu proses penilaian yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. Secara detail, penyelenggaraan EPSS bertujuan untuk:

- a. mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah;
- b. meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah; dan
- c. meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada instansi pusat dan pemerintahan daerah.

Keluaran EPSS adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS), yaitu suatu indikator yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di masing-masing instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral. Indeks ini, selain disajikan secara umum, juga disajikan menurut domain dan aspek. IPS merupakan salah satu indikator penilaian Reformasi Birokrasi (RB) General untuk seluruh instansi pemerintah. Disamping itu, IPS juga dapat menjadi ukuran dalam pencapaian pelaksanaan Satu Data Indonesia dan penyelenggaraan urusan statistik di tingkat pemerintahan daerah.



## METODOLOGI

EPSS dilaksanakan pada seluruh instansi pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral. Penilaian EPSS dilakukan melalui berbagai tahapan, mencakup tahapan penilaian mandiri, penilaian dokumen, dan penilaian interviu, serta penilaian visitasi jika diperlukan.

EPSS mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pemerintah yang terdiri atas 5 (lima) tingkat kematangan sebagaimana dijelaskan pada Tabel 1.

**Tabel 1**  
**Tingkat Kematangan dan Kriteria dalam EPSS**

Tingkat Kematangan (1)	Kriteria (2)
Level 1 Rintisan	Proses penyelenggaraan statistik sektoral belum dilakukan oleh seluruh unit kerja.
Level 2 Terkelola	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan oleh seluruh unit kerja, namun masih menggunakan standar yang hanya berlaku di unit kerja itu sendiri.
Level 3 Terdefinisi	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah diharmonisasi dan kemudian ditetapkan sebuah standar/pedoman oleh unit yang melaksanakan fungsi manajemen dan berlaku untuk seluruh unit kerja dalam organisasi.
Level 4 Terpadu dan Terukur	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan secara terpadu dan telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penyelenggaraan statistik sektoral dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses
Level 5 Optimum	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan peningkatan kualitas secara berkesinambungan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi.

EPSS menghasilkan Indeks Pembangunan Statistik dengan predikat yang disajikan dalam Tabel 2

**Tabel 2**  
**Predikat Indeks Hasil EPSS**

Nilai (1)	Predikat (2)
4,2 – 5,0	Memuaskan
3,5 – <4,2	Sangat Baik
2,6 – <3,5	Baik
1,8 – <2,6	Cukup
< 1,8	Kurang



Adapun cakupan yang dinilai dari EPSS meliputi 5 domain, 19 aspek, dan 38 indikator.

DOMAIN	ASPEK & INDIKATOR									
Prinsip Satu Data Indonesia	Standar Data Statistik			Metadata Statistik			Interoperabilitas Data			Kode Referensi dan/atau Data Induk
	Standar Data Statistik			Metadata Statistik			Interoperabilitas Data			Kode Referensi
Kualitas Data	Relevansi		Akurasi	Aktualitas & Ketepatan Waktu		Aksesibilitas			Keterbandingan & Konsistensi	
	Relevansi Data	Identifikasi Kebutuhan	Akurasi Data	Aktualitas Data	Ketepatan Diseminasi	Ketersediaan Data	Akses Media Penyebarluasan	Format Data	Keterbandingan Data	Konsistensi Statistik
Proses Bisnis Statistik	Perencanaan Data			Pengumpulan Data		Pemeriksaan Data		Penyebarluasan Data		
	Pendefinisian Kebutuhan	Desain Statistik	Penyiapan Instrumen	Proses Pengumpulan/Akuisisi		Pengolahan	Analisis	Diseminasi		
Kelembagaan	Profesionalitas				SDM yang Memadai dan Kapabel		Pengorganisasian Statistik			
	Transparansi Informasi	Netralitas dan Objektivitas	Kualitas Data	Konfidensialitas Data	SDM Statistik	SDM Manajemen Data	Kolaborasi Kegiatan Statistik	Forum SDI	Kolaborasi Pembina Statistik	Tugas Walidata
Statistik Nasional	Pemanfaatan Data Statistik			Pengelolaan Kegiatan Statistik				Penguatan SSN Berkelanjutan		
	Penggunaan Statistik Dasar	Penggunaan Statistik Sektoral	Sosialisasi dan Literasi Data	Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik				Perencanaan Pembangunan Statistik	Penyebarluasan Data	Pemanfaatan Big Data

Keterangan:

Domain
  Aspek
  Indikator

## INDEKS PEMBANGUNAN STATISTIK NASIONAL

**Tabel 3**  
**Nilai Indeks Hasil EPSS 2023 menurut Domain dan Jenis Instansi Pemerintah**

Indeks	Nasional	Jenis Instansi Pemerintah					
		Kementerian	LPNK	Instansi Lain	Pemprov	Pemkab	Pemkota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>IPS</b>	<b>1,78</b>	<b>2,29</b>	<b>2,51</b>	<b>1,77</b>	<b>2,01</b>	<b>1,66</b>	<b>1,88</b>
Domain Prinsip SDI	1,81	2,45	2,49	1,63	2,10	1,68	1,91
Domain Kualitas Data	1,70	2,22	2,51	1,84	1,87	1,57	1,80
Domain Proses Bisnis Statistik	1,82	2,31	2,74	1,84	1,99	1,69	1,83
Domain Kelembagaan	1,85	2,36	2,55	2,00	2,09	1,72	1,96
Domain Statistik Nasional	1,74	1,97	2,15	1,76	1,99	1,65	1,89



## 2 HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 2023

### KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL

Kegiatan statistik sektoral yang dinilai pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil meliputi:

- Data Pokok Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022
- Profil Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022

### HASIL PENILAIAN

Hasil penilaian dapat dilihat secara rinci pada Tabel 4 dan Tabel 5.

**Tabel 4**  
**Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain**

Domain	Bobot	Nilai Harapan	Nilai Nasional	Nilai Hasil Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Domain Prinsip SDI	28%	2,60	1,81	1,50
Domain Kualitas Data	24%	2,60	1,70	1,07
Domain Proses Bisnis Statistik	19%	2,60	1,82	1,00
Domain Kelembagaan	17%	2,60	1,85	1,79
Domain Statistik Nasional	12%	2,60	1,74	1,55
Indeks Pembangunan Statistik	100%	2,60	1,78	1,36



**Tabel 5**  
**Nilai Indeks Aspek**

Domain/Aspek	Bobot <sup>1</sup>	Nilai Indeks
(1)	(2)	(3)
<b>Domain Prinsip SDI</b>		
Standar Data Statistik	25%	2,00
Metadata Statistik	25%	2,00
Interoperabilitas Data	25%	1,00
Kode Referensi dan/atau Data Induk	25%	1,00
<b>Domain Kualitas Data</b>		
Relevansi	21%	1,00
Akurasi	16%	1,00
Aktualitas & Ketepatan Waktu	21%	1,00
Aksesibilitas	21%	1,33
Keterbandingan & Konsistensi	21%	1,00
<b>Domain Proses Bisnis Statistik</b>		
Perencanaan Data	32%	1,00
Pengumpulan Data	26%	1,00
Pemeriksaan Data	21%	1,00
Penyebarnya Data	21%	1,00
<b>Domain Kelembagaan</b>		
Profesionalitas	35%	1,75
SDM yang Memadai dan Kapabel	30%	1,00
Pengorganisasian Statistik	35%	2,50
<b>Domain Statistik Nasional</b>		
Pemanfaatan Data Statistik	34%	1,67
Pengelolaan Kegiatan Statistik	33%	1,00
Penguatan SSN Berkelanjutan	33%	1,99

Keterangan: <sup>1</sup> Bobot aspek pembentuk indeks domain



## KEUNGGULAN, KEKURANGAN, DAN REKOMENDASI

### 1. Domain Prinsip Satu Data Indonesia

#### Keunggulan:

- Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil tidak memiliki keunggulan pada domain prinsip satu data Indonesia karena seluruh aspek tidak mencapai predikat Baik.

#### Kekurangan:

- Penerapan aspek standar data statistik dan metadata statistik sudah dilakukan oleh produsen data, akan tetapi masih menggunakan pedoman masing-masing.
- Penerapan interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk masih pada tingkat kematangan rintisan.

#### Rekomendasi:

- Perlu dibuat aturan resmi dari Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil agar menerapkan Standar Data Statistik (SDS) di setiap pengumpulan data.
- Perlu dibuat aturan resmi dari Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil agar menyusun metadata statistik di setiap pelaksanaan kegiatan statistik sektoral.
- Interoperabilitas data harus diterapkan oleh setiap produsen data dan dibuat aturan resmi untuk penerapan interoperabilitas data.
- Penerapan kode referensi harus dilakukan setiap produsen data dan dibuat aturan resmi dari Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil agar menerapkan kode referensi.

### 2. Domain Kualitas Data

#### Keunggulan:

- Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil tidak memiliki keunggulan untuk domain kualitas data karena seluruh aspek tidak mencapai predikat Baik.

#### Kekurangan:

- Penerapan pendefinisian kualitas data pada aspek relevansi, aspek akurasi dan aspek aksesibilitas di Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil masih dilakukan oleh produsen data dengan pedoman masing-masing.
- Seluruh indikator pada aspek aktualitas dan ketepatan waktu serta aspek keterbandingan & konsistensi masih pada level rintisan.

#### Rekomendasi:

- Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil perlu menyusun dokumen kebijakan seperti surat edaran, SOP, petunjuk teknis atau dokumen sejenis lainnya yang mengatur penjaminan aktualitas dan ketepatan waktu, serta keterbandingan dan konsistensi data.
- Dokumen kebijakan tersebut diterapkan kepada seluruh produsen data dan dilakukan reviu serta evaluasi secara berkala untuk perbaikan.





### 3. Domain Proses Bisnis Statistik

#### Keunggulan:

- Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil tidak memiliki keunggulan untuk domain proses bisnis statistik karena seluruh aspek tidak mencapai predikat Baik.

#### Kekurangan:

- Penerapan pendefinisian kebutuhan statistik pada aspek perencanaan data di Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil masih belum dilakukan oleh seluruh produsen data.
- Seluruh indikator pada aspek pengumpulan data dan penyebarluasan data masih pada level rintisan.
- Penerapan pengolahan data pada aspek pemeriksaan data di Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil masih belum dilakukan oleh seluruh produsen data.

#### Rekomendasi:

- Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil perlu menyusun proses bisnis statistik yang terstandar untuk proses pendefinisian kebutuhan statistik, desain statistik, dan pengumpulan data, yang berlaku bagi seluruh produsen data dengan merujuk pada *Generic Statistical Business Process Model (GSBPM)*.
- Perlu adanya dokumen kebijakan yang mengikat seluruh produsen data seperti surat edaran, SOP, petunjuk teknis atau dokumen sejenis lainnya yang mengatur perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, penyebarluasan data.

### 4. Domain Kelembagaan

#### Keunggulan:

- Penjaminan transparansi informasi statistik telah dilakukan oleh setiap produsen data dan sudah ada aturan resmi dari Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- Walidata telah melaksanakan rencana aksi yang ditetapkan oleh Forum Satu Data Indonesia.
- Kolaborasi pembangunan/pengembangan data dengan pembina data statistik telah dilakukan secara formal.

#### Kekurangan:

- Penerapan penjaminan netralitas dan objektivitas terhadap penggunaan sumber data metodologi dan penerapan penjaminan konfidensialitas data pada aspek profesionalitas di Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil masih belum dilakukan oleh seluruh produsen data.
- Penerapan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) bidang manajemen data pada aspek SDM yang memadai dan kapabel di Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil masih belum dilakukan oleh seluruh produsen data.
- Penerapan kolaborasi dengan pembina data statistik pada aspek pengorganisasian statistik di Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil masih belum dilakukan oleh seluruh produsen data.



#### Rekomendasi:

- Perlu adanya dokumen kebijakan yang mengikat seluruh produsen data yang mengatur tentang profesionalitas, perencanaan SDM dan pengorganisasian statistik.
- Untuk penerapan kompetensi sumber daya manusia bidang manajemen data, perlu adanya perencanaan pembangunan SDM bidang manajemen data.
- Perlu adanya kolaborasi dengan pembina statistik, Walidata dan produsen data dalam rangka penyelenggaraan statistik sektoral.

### 5. Domain Statistik Nasional

#### Keunggulan:

- Penyebarluasan data telah dilakukan oleh Walidata untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

#### Kekurangan:

- Penggunaan data statistik dasar untuk perencanaan, monitoring, evaluasi, dan/atau penyusunan kebijakan belum berdasarkan kepentingan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- Sosialisasi data statistik kepada publik belum dilakukan oleh seluruh produsen data.
- Produsen data belum melakukan pemberitahuan rancangan kegiatan statistik ke BPS selaku pembina data.
- Perencanaan pembangunan statistik di Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil telah disusun dan ditetapkan namun belum dilaksanakan secara menyeluruh oleh semua produsen data.
- Pemanfaatan *big data* dalam kegiatan statistik sektoral belum dilakukan.

#### Rekomendasi:

- Perlu menggunakan statistik dasar dan statistik sektoral untuk perencanaan, monitoring, dan/atau penyusunan kebijakan untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil secara formal.
- Perlu adanya dokumen kebijakan yang mengikat seluruh produsen data yang mengatur tentang perencanaan pembangunan statistik, kematangan penyebarluasan data dan pemanfaatan *big data*.
- Penerapan dokumen kebijakan tersebut dapat dilakukan reviu/evaluasi secara berkala dan dilakukan pemutakhiran dalam domain statistik nasional.



## 3 TINGKAT KEMATANGAN PER INDIKATOR

Tabel 6  
Nilai Bobot dan Tingkat Kematangan per Indikator

Domain	Aspek	Indikator	Bobot <sup>1</sup>	Tingkat Kematangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Prinsip Satu Data Indonesia</b>	Standar Data Statistik	Tingkat Kematangan Penerapan Standar Data Statistik (SDS)	100%	2,00
	Metadata Statistik	Tingkat Kematangan Penerapan Metadata Statistik	100%	2,00
	Interoperabilitas Data	Tingkat Kematangan Penerapan Interoperabilitas Data	100%	1,00
	Kode Referensi dan/atau Data Induk	Tingkat Kematangan Penerapan Kode Referensi	100%	1,00
<b>Kualitas Data</b>	Relevansi	Tingkat Kematangan Relevansi Data Terhadap Pengguna	60%	1,00
		Tingkat Kematangan Proses Identifikasi Kebutuhan Data	40%	1,00
	Akurasi	Tingkat Kematangan Penilaian Akurasi Data	100%	1,00
	Aktualitas & Ketepatan Waktu	Tingkat Kematangan Penjaminan Aktualitas Data	50%	1,00
		Tingkat Kematangan Pemantauan Ketepatan Waktu Diseminasi	50%	1,00
	Aksesibilitas	Tingkat Kematangan Ketersediaan Data untuk Pengguna Data	34%	1,00
		Tingkat Kematangan Akses Media Penyebarluasan Data	33%	1,00
		Tingkat Kematangan Penyediaan Format Data	33%	2,00
	Keterbandingan & Konsistensi	Tingkat Kematangan Keterbandingan Data	50%	1,00
		Tingkat Kematangan Konsistensi Statistik	50%	1,00



Domain (1)	Aspek (2)	Indikator (3)	Bobot <sup>1</sup> (4)	Tingkat Kematangan (5)	
<b>Proses Bisnis Statistik</b>	Perencanaan Data	Tingkat Kematangan Pendefinisian Kebutuhan Statistik	33%	1,00	
		Tingkat Kematangan Desain Statistik	33%	1,00	
		Tingkat Kematangan Penyiapan Instrumen	34%	1,00	
	Pengumpulan Data	Tingkat Kematangan Proses Pengumpulan Data/Akuisisi Data	100%	1,00	
	Pemeriksaan Data	Tingkat Kematangan Pengolahan Data	50%	1,00	
		Tingkat Kematangan Analisis Data	50%	1,00	
	Penyebarluasan Data	Tingkat Kematangan Diseminasi Data	100%	1,00	
	<b>Kelembagaan</b>	Profesionalitas	Tingkat Kematangan Penjaminan Transparansi Informasi Statistik	25%	3,00
			Tingkat Kematangan Penjaminan Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data Metodologi	25%	1,00
Tingkat Kematangan Penjaminan Kualitas Data			25%	1,00	
Tingkat Kematangan Penjaminan Konfidensialitas Data			25%	2,00	
SDM yang Memadai dan Kapabel		Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Statistik	50%	1,00	
		Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Manajemen Data	50%	1,00	
		Tingkat Kematangan Kolaborasi	25%	2,00	



Domain	Aspek	Indikator	Bobot <sup>1</sup>	Tingkat Kematangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pengorganisasian Statistik	Penyelenggaraan Kegiatan Statistik		
		Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia	25%	3,00
		Tingkat Kematangan Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik	25%	3,00
		Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas Sebagai Walidata	25%	2,00
<b>Statistik Nasional</b>	Pemanfaatan Data Statistik	Tingkat Kematangan Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan	34%	2,00
		Tingkat Kematangan Penggunaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan	33%	2,00
		Tingkat Kematangan Sosialisasi dan Literasi Data Statistik	33%	1,00
	Pengelolaan Kegiatan Statistik	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik	100%	1,00
	Penguatan SSN Berkelanjutan	Tingkat Kematangan Perencanaan Pembangunan Statistik	33%	2,00
		Tingkat Kematangan Penyebarluasan Data	33%	3,00
		Tingkat Kematangan Pemanfaatan <i>Big Data</i>	34%	1,00

Keterangan: <sup>1</sup> Bobot indikator pembentuk indeks aspek



**ST 2023**  
**SENSUS PERTANIAN**

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga  
melayani  
bangsa**

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK**

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax: (021) 3863816

Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: [bpshq@bps.go.id](mailto:bpshq@bps.go.id)



\* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

\* Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli